

PERAN MASYARAKAT SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM

The Role of Society as a Foundation of Islamic Education

Rihat Almakiyah

UIN Antasari Banjarmasin

email:
rihatalmakiyah@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai moral dalam masyarakat. Namun, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat. Melalui tinjauan literatur dan penelitian empiris, jurnal ini menggali bagaimana masyarakat dapat menjadi landasan yang kuat dalam memberikan dukungan, pengembangan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pembahasan melibatkan konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, norma sosial, dan interaksi antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Temuan jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya kolaborasi erat antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memperkuat basis pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek formal di lembaga-lembaga pendidikan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan literatur dan studi kasus, jurnal ini mengeksplorasi kontribusi masyarakat dalam membentuk, mendukung, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Analisis mendalam terhadap hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan Islam menggambarkan bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pendidikan Islam secara keseluruhan.

Kata Kunci:

Pendidikan Islam, masyarakat, peran

Keywords:

Islamic education; community; community participation; educational foundations.

Abstract

Islamic education plays a central role in shaping character and moral values within society. However, the success of Islamic education depends not only on formal educational institutions but also on the active participation of the community. Through a literature review and analysis of relevant empirical studies, this article examines how society serves as a fundamental pillar in supporting, developing, and implementing Islamic values in education. The discussion highlights key concepts, including community participation, social norms, and the interaction between educational institutions and the wider community. The findings indicate that close collaboration between Islamic educational institutions and society is essential for creating a holistic, sustainable, and value-based educational environment. Such collaboration contributes to strengthening the quality of Islamic education while ensuring its relevance to the needs and challenges of contemporary society. The study further suggests that the active involvement of the community can enhance the effectiveness of educational policies and reinforce the role of Islamic education in fostering individuals with strong faith, noble character, and social responsibility. Furthermore, Islamic education should not be confined to formal educational settings alone; rather, it should be viewed as a shared responsibility among families, schools, and the community. Through this synergy, the values and principles of Islam can be effectively internalized, thereby improving the overall quality and sustainability of Islamic education.

Submit Tgl.: 10-Juli-2026	Diterima Tgl.: 11-Juli-2026	Diterbitkan Tgl.: 20-Juli-2026
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, melainkan memerlukan interaksi, kerja sama, dan hubungan timbal balik dengan orang lain. Aristoteles menyatakan bahwa manusia secara kodrati hidup dalam masyarakat karena hanya melalui kehidupan bersama manusia dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Soekanto

(2017) yang menjelaskan bahwa kehidupan sosial terbentuk melalui proses interaksi yang melahirkan nilai, norma, dan budaya sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi instrumen strategis untuk membimbing, mengembangkan, dan mengoptimalkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pendidikan akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sekaligus memberikan dampak terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Pendidikan tidak dapat diselenggarakan secara efektif tanpa adanya dukungan masyarakat, sementara masyarakat yang maju juga merupakan hasil dari sistem pendidikan yang berkualitas. Tilaar (2012) menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari sistem sosial sehingga keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Senada dengan itu, Mulyasa (2015) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, masyarakat bukan hanya menjadi objek penerima manfaat pendidikan, tetapi juga menjadi subjek yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, pembangunan sumber daya manusia akan mengalami hambatan sehingga suatu bangsa akan sulit bersaing di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Pendidikan memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik karena mampu meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter individu. Paulo Freire (2005) menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan manusia dari kebodohan dan ketertinggalan sehingga mampu menjadi subjek yang kritis terhadap realitas sosial. Sementara itu, John Dewey (2004) memandang pendidikan sebagai proses kehidupan itu sendiri (*education is life*), bukan sekadar persiapan menghadapi kehidupan. Dengan demikian, pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membangun masyarakat yang demokratis, produktif, dan berkeadaban. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan akan mendorong peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pembentukan karakter dan kepribadian seseorang berlangsung melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Emile Durkheim (1961) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses pewarisan nilai-nilai sosial yang bertujuan membentuk individu agar mampu hidup sesuai dengan norma masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan Lickona (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan moral (*moral knowing*), tetapi juga perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral action*). Dalam Islam, pembentukan karakter juga menjadi tujuan utama pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Attas (1991) bahwa hakikat pendidikan Islam adalah proses penanaman adab sehingga melahirkan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik

akan cenderung memiliki kemampuan interaksi sosial yang positif, menjunjung tinggi etika, menghormati nilai-nilai budaya, serta mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif pendidikan Islam, masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan selain keluarga dan sekolah. Abdullah Nashih Ulwan (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh lembaga pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Hasan Langgulung (2003) menambahkan bahwa masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai keislaman melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual, spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Semakin kuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan Islam, semakin besar pula peluang terwujudnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hubungan yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat akan melahirkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kajian mengenai peran masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan Islam serta kontribusinya dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Atas dasar tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam melalui artikel yang berjudul "Peran Masyarakat sebagai Landasan Pendidikan Islam."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan berbagai sumber tertulis sebagai objek utama dalam memperoleh data, menganalisis konsep, serta menyusun argumentasi ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, mengolah, dan menganalisis berbagai bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian. Senada dengan itu, Nazir (2014) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan teknik penelitian yang dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap buku-buku, dokumen, serta berbagai referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan konsep mengenai peran masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam berdasarkan berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, dan pemikiran para ahli. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna suatu fenomena melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau analisis statistik, tetapi lebih menekankan pada analisis konseptual terhadap berbagai literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai buku yang membahas pendidikan Islam, sosiologi pendidikan, serta hubungan pendidikan dengan masyarakat yang ditulis oleh para pakar, seperti Hasan Langgulung, Zakiah Daradjat, H.M. Arifin, Abdullah Nashih Ulwan, dan Muhaimin. Selain itu, artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional turut dijadikan sebagai sumber utama dalam memperkuat analisis. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, prosiding, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut

Sugiyono (2022), penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkaya informasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Arikunto (2019) menyatakan bahwa metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen, catatan, buku, arsip, maupun publikasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji meliputi buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian, karya ilmiah, serta berbagai referensi elektronik yang memiliki kredibilitas akademik.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan teknik analisis yang bertujuan mengidentifikasi makna, konsep, tema, dan hubungan antar gagasan yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka. Krippendorff (2018) menjelaskan bahwa *content analysis* merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi berdasarkan isi suatu dokumen atau teks. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi dan menyeleksi literatur yang relevan; (2) mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan; (3) melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep yang ditemukan; (4) membandingkan pendapat para ahli; serta (5) menyusun sintesis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi sehingga menghasilkan data yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Moleong (2021) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori sebagai pembanding untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai peran masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam berdasarkan perspektif teoritis dan hasil-hasil penelitian yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat dalam Perspektif Pendidikan Islam

Masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam merupakan lingkungan sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, serta perkembangan intelektual dan spiritual setiap individu. Secara etimologis, masyarakat dalam Al-Qur'an sering disebut dengan istilah *ummah*, yaitu sekelompok manusia yang terikat oleh persamaan tujuan, keyakinan, nilai, budaya, maupun kepentingan tertentu dalam menjalani kehidupan bersama. Maragustam menjelaskan bahwa *ummah* merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan terikat oleh agama, budaya, lingkungan sosial, keluarga, politik, maupun cita-cita bersama untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah sistem sosial yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Selain menggunakan istilah *ummah*, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *qawm*, *syu'ub*, *qabā'il*, *al-malā'*, *al-mustakbirūn*, dan *al-mustadh'afūn* untuk menggambarkan berbagai kelompok sosial dalam kehidupan manusia. Menurut Quraish Shihab, penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan keberagaman latar belakang sosial sebagai bagian dari sunnatullah yang harus dikelola dengan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan saling menghormati. Keberagaman

tersebut menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial yang dinamis sekaligus menjadi media pembelajaran bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-'Alaq ayat 2:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Artinya: "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." (QS. Al-'Alaq: 2)

Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan asal-usul penciptaan manusia secara biologis, tetapi juga mengandung makna filosofis bahwa manusia diciptakan dalam keadaan saling bergantung satu sama lain. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata 'alaq dapat dipahami sebagai sesuatu yang melekat atau bergantung, yang mengisyaratkan bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kehidupan sosial merupakan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Konsep tersebut semakin dipertegas dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa bukanlah penyebab perpecahan, melainkan sarana untuk saling mengenal (*ta'aruf*), bekerja sama, dan membangun kehidupan yang harmonis. Menurut Ibnu Katsir, tujuan penciptaan manusia yang beragam adalah agar tercipta hubungan sosial yang saling melengkapi, sedangkan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh asal-usul maupun status sosialnya, melainkan oleh tingkat ketakwaan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, masyarakat memiliki fungsi sebagai salah satu lingkungan pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Hasan Langgulung menyatakan bahwa masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik melalui interaksi sosial, pembiasaan, serta internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. Lingkungan masyarakat yang kondusif akan memperkuat proses pendidikan yang berlangsung di keluarga maupun di sekolah, sedangkan lingkungan yang kurang baik dapat menghambat perkembangan moral dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang religius, aman, dan edukatif sebagai bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya kehidupan sosial, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui interaksi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, masyarakat berperan membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian generasi muda sehingga mampu menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Peran dan Kedudukan Masyarakat sebagai Landasan Pendidikan Islam dalam Perspektif Sosiologi

Dalam perspektif sosiologi, masyarakat merupakan sistem sosial yang memiliki hubungan erat dengan proses pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena keduanya saling memengaruhi dan berkembang secara dinamis. Max Weber memandang sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial (*social action*) dan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Weber (2015), setiap tindakan individu memiliki makna yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya yang berkembang di lingkungan sosial. Oleh

karena itu, pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk perilaku sosial sekaligus mentransmisikan nilai-nilai yang dianut masyarakat kepada generasi berikutnya. Senada dengan Weber, Emile Durkheim menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses sosialisasi yang berfungsi menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan solidaritas sosial sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat bersifat timbal balik. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan masyarakat yang maju, sedangkan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan akan mendorong terciptanya lembaga pendidikan yang bermutu. Gazalba (1989) menjelaskan bahwa perkembangan sosial akan memengaruhi arah pendidikan, demikian pula pendidikan akan menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, masyarakat menjadi salah satu lingkungan pendidikan yang berperan membentuk kepribadian, karakter, serta akhlak peserta didik melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada sekolah atau madrasah, tetapi juga ditentukan oleh dukungan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari *tripusat pendidikan*.

Salah satu bentuk nyata peran masyarakat dalam pendidikan Islam adalah melakukan revitalisasi pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama (*madrasatul ula*) yang menjadi fondasi pembentukan akidah, akhlak, dan karakter anak. Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa orang tua memegang tanggung jawab terbesar dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak melalui keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan ibadah, serta pendidikan moral sejak usia dini. Oleh sebab itu, keluarga sebagai bagian dari masyarakat harus mampu menciptakan suasana religius yang mendukung tumbuh kembang peserta didik sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

Peran masyarakat juga diwujudkan melalui penguatan konsep *learning society* atau masyarakat belajar. Dalam Islam, masjid, mushala, langgar, majelis taklim, dan berbagai lembaga pendidikan nonformal memiliki fungsi strategis sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Hasan Langgulung menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga berkembang melalui aktivitas sosial-keagamaan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Sejak masa Rasulullah saw., masjid telah menjadi pusat pendidikan, dakwah, musyawarah, dan pemberdayaan umat. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat sehingga fungsi edukatif masjid di beberapa tempat mulai berkurang. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat pembelajaran masyarakat menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat pendidikan Islam di era digital.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam Komite Sekolah atau Komite Madrasah. Keikutsertaan masyarakat dalam lembaga tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Menurut Mulyasa (2015), keterlibatan masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung berbagai program pendidikan agama yang diselenggarakan oleh sekolah maupun madrasah. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian motivasi kepada peserta didik, penyediaan sarana dan prasarana, pembiasaan budaya religius, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pembelajaran Al-Qur'an, salat berjamaah, pesantren Ramadan, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Menurut Muhaimin (2012), keberhasilan pendidikan agama Islam

tidak hanya ditentukan oleh kurikulum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya religius yang dibangun secara bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Peran masyarakat yang tidak kalah penting adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Keberadaan pesantren, madrasah, taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), majelis taklim, dan berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya merupakan bukti nyata partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tilaar (2012) menyatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama (*stakeholder*) dalam pendidikan yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengembangkan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, semakin besar partisipasi masyarakat dalam membangun lembaga pendidikan Islam, semakin besar pula peluang terciptanya generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Landasan yuridis mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan pendidikan, serta menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif pendidikan Islam, prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial.

C. Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat dalam Pendidikan Islam

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Mulyasa (2015), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, material, maupun pengawasan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemanfaatan layanan pendidikan yang tersedia. Dalam bentuk ini, masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan mempercayakan pendidikan anak kepada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Meskipun tergolong sebagai bentuk partisipasi paling sederhana, keterlibatan tersebut merupakan langkah awal dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Tilaar (2012) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun kualitas pendidikan nasional.

Selain memanfaatkan layanan pendidikan, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui pemberian dukungan berupa dana, tenaga, maupun sarana dan prasarana pendidikan. Dukungan tersebut dapat berupa pembangunan ruang kelas, penyediaan fasilitas pembelajaran, bantuan beasiswa, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial di sekolah dan madrasah. Dalam perspektif pendidikan Islam, bentuk partisipasi tersebut merupakan implementasi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 agar umat Islam saling

membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah yang memiliki dimensi ukhrawi.

Partisipasi masyarakat juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah atau madrasah. Orang tua dan tokoh masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, kegiatan keagamaan, maupun program pembinaan karakter peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan tersebut mencerminkan prinsip demokratis dalam pengelolaan pendidikan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara sekolah dan masyarakat.

Bentuk partisipasi lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Orang tua, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta alumni dapat berperan sebagai narasumber, pembina kegiatan keagamaan, pendamping peserta didik, maupun penyelenggara program sosial dan keagamaan di sekolah. Kegiatan seperti pesantren Ramadan, peringatan hari besar Islam, bakti sosial, pembinaan baca tulis Al-Qur'an, dan penguatan karakter Islami merupakan contoh nyata kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat. Menurut Epstein (2011), kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu meningkatkan prestasi belajar, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik secara signifikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Abdurrahman An-Nahlawi (2002) menjelaskan bahwa tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk saling menasihati dalam kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta menjaga generasi dari penyimpangan akidah dan akhlak. Prinsip tersebut ditegaskan Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara sehingga memiliki kewajiban untuk saling memperbaiki dan menjaga persatuan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai hambatan. Dari sisi pemerintah, kendala yang sering dijumpai antara lain lemahnya komitmen dalam melibatkan masyarakat pada proses pengambilan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan anggaran bagi program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat masih ditemukan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, budaya paternalistik yang menganggap pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, serta sikap apatis akibat kurangnya ruang partisipasi. Menurut Tilaar (2012), rendahnya partisipasi masyarakat umumnya disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga hubungan kemitraan belum terbangun secara optimal.

Oleh karena itu, pendidikan Islam memandang masyarakat sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif melalui penyelenggaraan taman pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, perpustakaan masyarakat, gerakan literasi, penggalangan dana pendidikan, serta berbagai aktivitas sosial yang mendukung proses pembelajaran. Dengan terciptanya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, tujuan pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil akan lebih mudah diwujudkan secara berkelanjutan.

D. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pendidikan agar tercipta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Menurut Tilaar (2012), partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang demokratis karena masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam menentukan arah dan mutu pendidikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan Islam melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah, melainkan merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan umat Islam untuk mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari kemungkaran. Dengan demikian, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung keberhasilan pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui penguatan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hubungan yang harmonis akan memudahkan proses komunikasi dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pendidikan. Mulyasa (2015) menyatakan bahwa kemitraan yang baik antara sekolah dan masyarakat akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, dukungan, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, forum seperti Komite Sekolah, Komite Madrasah, maupun musyawarah bersama orang tua perlu dioptimalkan sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pendidikan. Keterlibatan tersebut tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap lembaga pendidikan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan adanya ruang partisipasi yang terbuka, masyarakat akan terdorong untuk berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

Upaya berikutnya adalah mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Masjid, mushala, majelis taklim, taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan Islam berbasis masyarakat. Hasan Langgulung menjelaskan bahwa pendidikan Islam berlangsung sepanjang hayat dan tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga berkembang melalui aktivitas sosial-keagamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan lembaga keagamaan perlu diarahkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat literasi Al-Qur'an, pendidikan karakter, pembinaan akhlak, serta penguatan moderasi beragama.

Perkembangan teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam. Media digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai program pendidikan, membangun komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta menyediakan berbagai sumber

belajar yang mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Castells (2010), masyarakat modern telah memasuki era *network society*, yaitu masyarakat yang aktivitas sosialnya didukung oleh jaringan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan sekaligus memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Di samping itu, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi. Penghargaan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dapat berupa pengakuan, apresiasi, maupun kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan program pendidikan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai konsekuensi sosial apabila tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan, karena rendahnya partisipasi masyarakat akan berdampak pada menurunnya mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan Islam memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, sekolah, keluarga, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Islam akan berjalan secara optimal apabila setiap komponen masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna hasil pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam dan pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Masyarakat merupakan salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam selain keluarga dan sekolah. Dalam perspektif Islam, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan religius dalam membentuk kepribadian, akhlak, serta karakter peserta didik. Al-Qur'an melalui QS. Al-Hujurat ayat 13 dan berbagai ayat lainnya menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam keberagaman untuk saling mengenal, bekerja sama, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai ketakwaan.

Dalam perspektif sosiologi, hubungan antara masyarakat dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang maju, sedangkan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan akan mendorong terciptanya lembaga pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan dukungan moral dan material, terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah, mengembangkan lembaga pendidikan Islam, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai keislaman.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, lemahnya dukungan kebijakan, serta pengaruh perkembangan teknologi dan budaya yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, optimalisasi fungsi masjid serta lembaga keagamaan, pemberdayaan Komite Sekolah dan Komite Madrasah, serta pemanfaatan teknologi informasi secara positif sebagai media pendidikan dan dakwah.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam sekaligus melahirkan generasi yang mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The concept of education in Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- An-Nahlawi, A. (2002). *Prinsip-prinsip dan metode pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Anwar, K., & Masuwd, M. A. (2026). Artificial Intelligence, Social Media, and Post-Truth: An Islamic Education Perspective. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 9(2), 245-264.
- Arifin, H. M. (2011). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Oxford, England: Wiley-Blackwell.
- Choiri, M. M. (2017). Upaya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar anak. *Jurnal Refleksi Edukatika*, 8(1), 89–98.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Durkheim, E. (1961). *Education and sociology*. New York, NY: Free Press.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Fadhilaturrahmi. (2018). Lingkungan belajar efektif bagi siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 2(2), 61–69.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). New York, NY: Continuum.
- Gazalba, S. (1989). *Masyarakat Islam: Pengantar sosiologi dan sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. Z. S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160.
- Hasbullah. (2017). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Juabdin Sada, H. (2017). Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 117–125.
- Langgulong, H. (2003). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Latifah, L., & Nglimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character*. New York, NY: Bantam Books.

- Maragustam. (2018). *Filsafat pendidikan Islam menuju pembentukan karakter menghadapi arus global*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2015). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat*. Semarang: Alprin.
- Qardhawi, Y. (2000). *Pendidikan Islam dan madrasah Hasan Al-Banna*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahmat, A. (2021). *Hubungan sekolah dan masyarakat*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 561-566.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF AGAMA. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33-39.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, J. (2001). *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surawardi. (2015). Dasar-dasar sosiologis pendidikan Islam. *Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 15–27.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulwan, A. N. (2015). *Pendidikan anak dalam Islam*. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Weber, M. (2015). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism* (Y. Sudiarja, Trans.). Yogyakarta: Narasi–Pustaka Promethea.
- Wiratno, B. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 112–121.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.